

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Dalam bab ini terdapat beberapa kajian terdahulu yang memuat sebuah konsep-konsep dan teori yang akan berhubungan dari fokus penelitian. Tidak banyak penelitian yang membahas negara Jepang sebagai aktor utama dalam penelitiannya, tetapi kebanyakan peneliti lebih mengarah pada pembahasan yang menggunakan Cina sebagai aktor utama. Sehingga penelitian dan analisis mengenai Kebijakan Jepang melalui *National Security Strategy* (NSS) dalam Menjaga Stabilitas di Laut Cina Timur masih sangat sedikit, terlebih pembahasan ini merupakan sebuah penelitian baru dalam melihat kebijakan baru yang dikeluarkan Jepang pada tahun 2022 untuk menjaga kestabilan di Laut Cina Timur. Penelitian ini akan memaparkan 10 (sepuluh) penelitian terdahulu yang membahas mengenai kebijakan Jepang dalam menjaga stabilitas regional atau yang berhubungan.

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dikemukakan oleh Fadhil Alghiffar dengan Raja Nathania Olga Letticia, penelitian ini berjudul “*Analisis Teori Offense-Defense Pada Reformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Dalam Dinamika Keamanan Di Asia Timur*” penelitian ini diterbitkan pada tahun 2016 sebagai penelitian yang dikeluarkan oleh “*Global: Jurnal Politik Internasional*”. fokus dari penelitian ini adalah sebuah reformasi kebijakan pertahanan Jepang dalam pandangan teori *offese-defense*, penelitian ini merujuk pada sepuluh hipotesis, hipotesis ini dikemukakan oleh Van Evera yang berjudul penyebab terjadinya

sebuah perang, dari penelitian ini terlihat bahwa dari ketiga diantaranya dapat memberikan penjelasan alasan dari sebuah *military buildup* yang dilakukan Jepang. Fadhil menggunakan paradigma *structural realist* yaitu dari mengacu sebuah teori *offense-defense* yang telah dipaparkan oleh Stephen Van Evera. Fadhil berusaha menganalisis beberapa faktor yang menjadikan Jepang melakukan reformasi kebijakan pertahanan, yaitu faktor penyebab perang dan faktor apa yang membuat terjadinya perang.

Fadhil di dalam penelitiannya mencoba untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan Jepang dengan mengeluarkan kebijakan pertahanannya sebagai penyeimbang *offense-defense* keamanan di Kawasan Asia Timur. Ditinjau dari beberapa aspek penilaian yaitu: peningkatan kapabilitas militer, kondisi geografi, tatanan sosial dan politik, serta diplomatik *arrangements*. Jepang meyakini bahwa tidak akan selamanya Amerika untuk mengurus permasalahan yang terjadi di Asia Timur, sehingga Jepang berusaha untuk memberikan pertahanan militer yang kuat yaitu dengan menggunakan kemampuan *offensive* dalam memberikan rasa aman bagi Jepang. Kemampuan *offensive* ini bukan berarti pemerintah Jepang akan berkelakuan yang sangat agresif yang terjadi pada saat di perang dunia 2. Walaupun demikian, Amerika tetap berusaha mengajak kerja sama pertahanan dengan Jepang, guna menghadapi kebangkitan kekuatan Cina di Asia Timur (Alghifari & Olga Letticia, 2016).

Dilihat dari keadaan geografi Jepang yang terpisah dengan negara tetangga lain di Asia Timur, ini menjadikan Jepang meningkatkan nilai pertahanan keamanan terutama di bidang maritim. Namun, jarak antara daratan Cina dengan Jepang

menjadi kendala bagi Jepang serta kepemilikan teknologi militer Cina, menjadikan Jepang dalam upaya untuk melakukan sebuah *military build-up* guna sebagai salah satu penangkal dari sebuah serangan ataupun invasi dari jalur laut. Faktor selanjutnya yang diteliti oleh Fadhil yaitu mengangkat popularitas yang dimiliki oleh Shinzo Abe, popularitas yang dimiliki Shinzo Abe meningkat dengan mengangkat isu *defense reform*, sehingga memudahkan untuk Abe mengeluarkan kebijakan-kebijakan peningkatan militer (Alghifari & Olga Letticia, 2016).

Terakhir penelitian ini, Fadhil berusaha menilai dari aspek *diplomatic arrangements*, yang menyatakan berawal dari ketakutan Jepang terhadap gagalnya sebuah konsep yang digunakan oleh Jepang yaitu konsep *collective defense*, *collective security*, serta perilaku *balancing* dari *neutral state*, hal ini dapat menimbulkan terjadinya sebuah perang dunia. Maka dari itu Amerika menciptakan sebuah aliansi dengan Jepang, serta Amerika masih membutuhkan sebuah peran yang lebih dari pada sekutu di Asia, untuk mengimbangi kekuatan yang dimiliki Cina. Akhirnya menjadikan *defensive alliance* merupakan sebuah pegangan untuk mengimbangi *offense* Cina atau mengimbangi *offense* Korea Utara. Peneliti berasumsi bahwa Jepang yang akhirnya telah berperan dalam mempertahankan dari status quonya di Asia Timur sehingga peperangan tidak terjadi sampai saat ini.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama melihat alasan Jepang mereformasi kebijakan pertahanan namun, yang menjadi sebuah pembeda antara penelitian Fadhil dengan peneliti adalah dengan melihat pengaruh dari reformasi kebijakan Jepang terhadap kestabilan di wilayah Asia Timur. Serta peneliti berusaha memberikan penelitian yang lebih lengkap tentang kebijakan apa saja yang

dikeluarkan oleh negara Jepang serta kepastian aktor dari penelitian. Meski demikian, penelitian ini memiliki kelemahan dari penggunaan teori *offense-defense balance*, yaitu masih belum mampu menjelaskan secara terperinci. Walaupun teori *offense-defense balance* ini dapat menawarkan penyebab terjadinya perang serta dinamika keamanan dan pertahanan di suatu wilayah tetapi, tidak untuk sebuah keseimbangan di kawasan.

Penelitian terdahulu kedua yang dikemukakan oleh Angga Nurdin Rachmat, penelitian yang berjudul “*Security Dilemma Dalam Dinamika Hubungan Bilateral Cina dan Jepang*”. Penelitian ini di publikasi pada tahun 2017 sebagai *interdependence jurnal hubungan internasional*. Fokus penelitian ini melihat hubungan antara negara Cina dengan Jepang, yang akhirnya menjadikan kedua negara berusaha untuk menciptakan sebuah persaingan teknologi senjata, dan memunculkan sebuah keadaan kedua negara dalam *security dilemma* dimana kedua negara saling melakukan perlombaan senjata atau *arms race*.

Angga berusaha menjelaskan bagaimana sejarah hubungan diantara Cina dan Jepang, yang akhirnya menjadikan sebuah hubungan yang *enmity*, Barry Buzzan menggambarkan bagaimana sebuah hubungan *enmity*, *enmity* merupakan sebuah hubungan diantara kedua negara atau lebih yang memicu sebuah hubungan atas dasar saling curiga (*suspicion*) serta rasa takut (*fear*). Sejarah yang diambil oleh angga yaitu sejarah imperialisme dari Jepang pada masa lalu, yang menjadi sebuah mimpi buruk bagi Cina pada masa itu. Penelitian ini menggunakan teori *security dilemma* untuk menganalisis sebuah fenomena yang terjadi antara hubungan

bilateral yaitu Jepang dan Cina, yang akhirnya menjadikan lahirnya sebuah *security dilemma* dari konflik-konflik yang dilakukan kedua negara.

Dari faktor Sejarah inilah yang menjadikan Cina untuk termotivasi dalam peningkatan teknologi kekuatan senjata militer, yang menjadikan Cina sebagai kekuatan baru di Asia. Dinamika hubungan bilateral dari kedua negara ini telah membawa Kawasan Asia Timur menjadi cukup rapuh, disebabkan akibat dari ketegangan diantara kedua negara tersebut. Ketegangan yang terjadi diakibatkan oleh persaingan yang terjadi diantara kedua negara, seperti masalah persaingan kekuatan militer, dan masalah sengketa wilayah (Rachmat, 2017).

Tidak henti-hentinya Jepang akan terus meningkatkan kekuatannya, yaitu dalam rangka untuk melakukan *deterrence*. Sehingga mengharuskan Jepang untuk melakukan sebuah re-militerisasi untuk menjadikan negaranya sebagai negara *normal state*. Bagi Jepang modernisasi militer Cina merupakan sebuah ancaman bagi negara Jepang, Dengan terikatnya negara ini terhadap pasal 9 atau artikel 9 konstitusi, yang menyatakan bahwa Jepang telah mengurangi kapabilitas militernya dalam pengadaan perang serta menggunakan persenjataan yang terbatas dan hanya untuk kepentingan *defensive* (Rachmat, 2017).

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan dengan peneliti yaitu peneliti berusaha melihat hubungan yang terjadi antara Cina dan Jepang, bahkan peneliti melihat awal mula masalah tersebut dari terciptanya sebuah *security dilemma* antara Jepang dan Cina. Bukan hanya itu persamaan aktor yang terlibat menjadikan perlanjutan dari penelitian ini. Namun, di dalam penelitian ini tidak memberikan

gambaran dari pengaruhnya terhadap kestabilan wilayah Asia Timur, penelitian berusaha untuk memberikan pemahaman bahwa kedua negara tersebut mengalami *security dilemma*. Penelitian ini memberikan sebuah gambaran yang menuju ke pesimisan yang terjadi dari kedua hubungan negara tersebut, dengan menyatakan “*akan sulitnya membentuk pola kooperatif diantara kedua negara dimasa yang akan datang*” (Rachmat, 2017).

Penelitian terdahulu ketiga yang berjudul “*UPAYA JEPANG DIBAWAH PEMERINTAHAN SHINZO ABE DALAM MENINGKATKAN PERTAHANAN MILITER*”, yang di tulis oleh Ananda F Ayu. Penelitian ini di publikasi pada tahun 2015 sebagai jurnal *Transformasi*. Penelitian ini berfokus pada peningkatan pertahanan militer Jepang dimasa pemerintah perdana menteri Shinzo Abe, yang dilatar belakangi dengan kondisi Kawasan Asia Timur. Upaya Jepang dalam meningkatkan kondisi militer terkait pertahanan Regional Asia Timur, di perkuat dengan adanya dukungan dari rakyat Jepang terhadap masalah keamanan, dan perubahan konstitusi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan Shinzo Abe mengembangkan kebijakan militer Jepang dengan menerapkan konsep *dynamic defense force*, konsep ini muncul pada tahun 2010, lalu Jepang berusaha untuk mengubah sebuah doktrin dari pertahanannya dengan menggantinya menjadi sebuah doktrin baru, yaitu dengan mengganti sebuah doktrin *basic defense force concept* menjadi sebuah doktrin *dynamic defese force*. Ini berarti bahwa Jepang tidak hanya berlindung dari kekuatan militer AS, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keamanan wilayah tersebut. Ini disebabkan oleh sejumlah

alasan, seperti keinginan Amerika untuk melindungi Kawasan Asia Timur dari ancaman kekuatan militer Korea Utara, yang akan memberikan ancaman terhadap kepentingan Amerika di Jepang dan jalur perdagangan Asia secara keseluruhan (Ayu, 2015).

Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan peneliti, yaitu dengan melakukan sebuah pengumpulan data secara deskripsi dari berbagai sumber kajian, pakar, serta buku-buku penunjang. Serta peneliti berusaha untuk memberikan gambaran perkembangan dari pertahanan keamanan militer Jepang, serta kebijakan pertahanan keamanan apa yang dikeluarkan oleh pemerintahan Shinzo Abe. Yaitu dengan melihat data yang telah dikumpulkan dari sebuah studi *library research* yang sesuai dengan topik penelitian.

Dengan latar belakang kondisi yang tidak aman dari Regional Asia Timur, utamanya terkait dengan sengketa dengan Cina di Laut Cina Timur dan Korea Utara. Maka Shinzo Abe mengharuskan untuk mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi Jepang, yang akhirnya didukung oleh semua rakyat Jepang terhadap masalah keamanan di negara Jepang. Kebijakan tersebut adalah: bekerja samanya Jepang dengan organisasi regional ASEAN dalam usaha mengurangi pengaruh Cina di kawasan, serta Re-interpretasi pasal 9 konstitusi, sehingga dapat meningkatkan dari keterbukaan perekonomian Asia Pasifik dan akan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah kawasan (Ayu, 2015).

Persamaan penelitian ini adalah peneliti sama-sama meneliti kebijakan keamanan militer Jepang atas dasar meningkatkan pertahanan Jepang terhadap

kekuatan militer yang dimiliki Cina, dengan itu peneliti melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Shinzo Abe dilatar belakangi kondisi yang tidak aman dari regional di Asia Timur. Namun, penelitian ini perlu adanya sebuah penelitian lanjutan dalam melihat strategi yang dikeluarkan Jepang di tengah meningkatnya kekuatan Cina di Asia Timur, dengan begitu hal ini menjadikan sebuah perbedaan dari penelitian ini, yang mana pada saat ini telah berubahnya kepemimpinan di Jepang. Berikutnya penelitian ini perlu adanya sebuah penelitian lanjutan yang akan melihat bagaimana pengaruh dari strategi kebijakan Jepang terhadap kestabilan di Kawasan Asia Timur.

Penelitian terdahulu keempat yang berjudul “*DAMPAK SENGKETA KEPULAUAN SENKAKU ANTARA JEPANG - CINA TERHADAP STABILITAS KEAMANAN JEPANG*”, yang ditulis oleh Tjhang Zahra Anisa Pramaiseilla. Penelitian ini dipublikasi pada tahun 2023 sebagai *Journal of International Relations* yang dikeluarkan oleh universitas Diponegoro. Penelitian ini berfokus pada dampak yang terjadi terhadap kestabilan keamanan Jepang, dari konflik diantara Jepang dan Cina yaitu sebuah sengketa atau perebutan kepulauan Senkaku. Sengketa ini dimulai pada saat Cina melakukan operasi militer dengan mempersenjatai para nelayan di Senkaku, yang akhirnya menjadikan stabilitas keamanan Jepang mulai menurun.

Pertanyaan pada penelitian ini yaitu “*Bagaimana dampak Konflik Kepulauan Senkaku terhadap stabilitas keamanan Jepang?*”. Penelitian ini menggunakan satu tinjauan Pustaka yang menggambarkan perbedaan dari penelitian tersebut. Peneliti menggunakan konsep keamanan nasional sebagai

konsep dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian tersebut, dibarengi dengan sebuah metode yaitu kualitatif serta tujuan penelitian dalam mengategorikan, memilih, mengumpulkan, dan kemudian memberikan penjelasan data tersebut dari sebuah dampak sengketa kepulauan Senkaku antara Jepang dan Cina.

Penelitian ini menghasilkan bahwa keabsahan Jepang terhadap pemilik dari kepulauan Senkaku tersebut, dibuktikan dari sebuah perjanjian yaitu perjanjian Okinawa pada tahun 1972 yang dimana kepulauan Senkaku/Diaoyu termasuk ke dalam sebuah wilayah yang sah dipegang oleh Jepang. Dengan ditemukannya sebuah sumber daya alam yang melimpah yaitu minyak, dan gas menjadikan konflik atas kedua negara tersebut. Dimana letak geografi dari kedua negara yang begitu dekat mengharuskan keduanya memiliki strategi untuk mendapatkan kepemilikan pulau tersebut (Pramaiseilla, 2023).

Klaim Cina terhadap kepulauan Senkaku atau Diaoyu didasarkan oleh persepsi tanah air yang sudah ada berabad-abad lalu, yang kemudian konflik semakin besar setelah di temukannya potensi sumber daya alam yang melimpah. Dari adanya persengketaan ini bukan hanya stabilitas keamanan negara Jepang yang akan terganggu, tetapi juga akan terganggu dalam hubungan kedua negara tersebut. Munculnya sikap Cina yang mengeluarkan operasi militer terhadap para nelayan, menjadikan Jepang mengubah sikap pasifisnya menjadi lebih aktif dalam pertahanan keamanannya. Ini diperkuat dengan banyaknya dukungan warga Jepang dan Amerika (Pramaiseilla, 2023).

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jepang dalam mempertahankan stabilitas keamanannya, yaitu dengan mengeluarkan anggaran biaya militer terbesar, serta mengeluarkan serangkaian kebijakan yang proaktif. Hal ini dimulai dengan dikeluarkannya dari sebuah kebijakan keamanan dan pertahanan negara Jepang, dalam membentuk dewan keamanan nasional, serta meningkatkan intensitas strategi keamanan dan pertahanan. Bukan hanya itu, Jepang berusaha untuk meningkatkan kerja sama militer dengan Amerika dan Inggris, serta memperkuat pertahanan dari pulau-pulau di sekitar Senkaku dengan pasukan beladiri Jepang atau *Japan Self Defence Force* (JSDF) (Pramaiseilla, 2023).

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu adanya sebuah penelitian yang meneliti sengketa kepulauan, dalam hal ini sengketa kepulauan Senkaku merupakan awal dari sebuah konflik yang peneliti lihat, serta awal mula pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan (NSS) tersebut. Namun, pembahasan ini perlu adanya penelitian lanjutan terhadap pengaruhnya pada kestabilan Kawasan Asia Timur. Perlu diketahui bahwa, dengan kepemilikan kekuatan militer dan ekonomi terbesar diantara negara tetangga lain di Asia Timur, menjadikan hubungan kedua negara ini perlu adanya perhatian yang lebih. Serta menjadikan sebuah penelitian baru bagi peneliti untuk melihat konflik ini mempengaruhi kestabilan di Kawasan Asia Timur.

Penelitian terdahulu kelima yang di tulis oleh Pradono Budi Saputro, dengan judul “*Strategi Counterbalance Jepang di Tengah Persaingan Kepemimpinan dengan Tiongkok dalam Konteks Wacana Regionalisme Asia Timur*”. Penelitian ini di publikasi pada tahun 2015 sebagai *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK*

DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL. Penelitian ini berfokus tentang bagaimana kebangkitan Tiongkok sebagai sebuah ancaman bagi negara yang ada di wilayah Asia Timur, atau bahkan sebagai sebuah ancaman bagi keamanan regional. Meningkatnya pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut, menjadikan momentum bagi Jepang dalam memulai sebuah wacana pembentukan regionalisme baru dengan konsep yang lebih terbuka serta mengundang aktor lain diluar Regional dalam pembentukan Regional Asia Timur, hal ini merupakan sebuah strategi yang dikeluarkan Jepang untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap kekuatan Tiongkok.

Konsep regionalisme digunakan oleh peneliti untuk melihat bagaimana *counterbalance* yang dilakukan Jepang, dalam mendapatkan kepemimpinan di kawasan Regional Asia Timur. Kemudian menjadikan Jepang dalam mengambil jalan tengah Sebagai alternatif untuk lebih mengedepankan sebuah pendekatan liberal serta mengangkat *universal value* dalam menciptakan sebuah keadaan yang kondusif yang akhirnya terwujudlah sebuah kerja sama. Kepemimpinan ini merupakan sebuah strategi Jepang dalam penyeimbang terhadap Tiongkok. Pradono dalam penelitiannya berusaha menggunakan forum-forum seperti *ASEAN Plus Three (APT)*, *East Asian Summit (EAS)*, dan *ASEAN Regional Forum (ARF)* untuk usaha yang dilakukan Jepang dalam meng *counterbalance* kekuatan dan pengaruh Tiongkok. Dilihat dari dukungan penuh Jepang terhadap gagasan terbentuknya forum ini, bahkan Jepang berhasil meyakinkan Amerika betapa pentingnya sebuah kerja sama multilateral Kawasan di Asia Pasifik. Sampai saat ini ARF telah menjadi sebuah forum keamanan multilateral yang sangat penting dalam Kawasan Asia Pasifik yang telah memiliki 27 anggota (Saputro, 2015).

Pembentukan APT bertujuan untuk mewujudkan sebuah gagasan Regionalisme Asia Timur yang lebih inklusif serta terbuka. Tiongkok menganggap sebaiknya APT yang saat ini dijadikan sebagai fokus institusi Regional Asia Timur, karena APT hanya melibatkan beberapa negara Asia Timur dan melibatkan negara yang ada di ASEAN, dijadikan oleh Tiongkok sebagai strategi dalam membentengi kawasan dari pengaruh *big power*. Hal ini terlihat bahwa tidak adanya negara yang mampu menandingi secara kekuatan militer dan ekonomi dari kedigdayaan Tiongkok (Saputro, 2015).

Peneliti melihat bahwa dalam beberapa tahun ke depan, hubungan diantara Jepang dan Tiongkok kemungkinan besar akan mengalami sebuah kestabilan serta tidak akan mengalami perubahan. Dibuktikan dengan hubungan dari ekonomi kedua negara itu yang baik, tetapi ekspansi ekonomi dan militer Tiongkok terus menimbulkan asumsi ancaman Jepang. Usaha *counterbalance* Jepang yaitu memainkan peran ganda dalam percaturan politik kawasan, mengejar sebagai perang kekuatan utama di kawasan dalam persaingan hegemoni, juga menjaga kepentingan Amerika di kawasan. Sehingga mengharuskan Jepang untuk mampu dalam menjembatani dua peran agar tidak terlalu tenggelam dalam pusaran arus kepentingan (Saputro, 2015).

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdapat sebuah persaingan antara Jepang dan Tiongkok, yang mengharuskan Jepang untuk menciptakan sebuah strategi baru dalam menyeimbangkan kekuatan Tiongkok. Namun kenyataannya bahwa akan sulit bagi Jepang untuk melakukan sebuah penyeimbang hanya dengan menjadi sebuah pemimpin di Kawasan Asia Timur, yang kita tahu bahwa

pembentukan regionalisme di Kawasan Asia Timur sulit dilakukan. Akhirnya mengharuskan Jepang untuk menggunakan sebuah strategi baru. Strategi baru itu yang akan peneliti lihat bukan hanya melihat dari sengketa yang terjadi Tiongkok dengan Jepang di Laut Cina Timur. Tetapi, melihat dari sengketa yang terjadi mengharuskan Jepang untuk mengeluarkan sebuah kebijakan baru, yaitu pengeluaran anggaran militer Jepang terbesar setelah perang dunia kedua. Hal ini yang menjadikan perbedaan dari penelitian Pradono dengan peneliti, maka dari itu perlu adanya penelitian lanjutan terhadap *counterbalance* yang dilakukan Jepang terhadap kekuatan dan pengaruh Tiongkok.

Penelitian terdahulu keenam dengan berjudul “*Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014 (Transformation of Japan's Defense Policy in 2014)*”, penelitian ini merupakan sebuah journal yang dikeluarkan oleh universitas jember. Penelitian ini diteliti oleh Wildan Saisol yang dipublikasi pada tahun 2015. Penelitian ini berfokus pada perubahan kebijakan pertahanan Jepang pada tahun 2014 yang meluncurkan sebuah dokumen kebijakan *National Security Strategi* (NSS) serta Garis Besar Program Pertahanan Nasional Jepang atau *Nation Defense Program Guidelines* NDPG, dari dokumen itu pemerintah Jepang memberikan sebuah konsep baru dalam pengambilan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang, yaitu konsep proaktif terhadap perdamaian oleh pemerintah perdana menteri Shinzo Abe.

Dengan menggunakan rumusan masalah yaitu “*bagaimana bentuk adaptasi Jepang dengan terhadap dinamika keamanan di Kawasan Asia Timur?*”, peneliti berusaha menjawab pertanyaan dengan berfokus pada pembahasan terhadap sebuah

bentuk dari konsep *proactive pacifism* terhadap kebijakan pertahanan Jepang tahun 2014. *Proactive pacifism* menganggap bahwa tidak akan menolak perang atau bahkan tidak akan mengharamkan perang. Bahkan Shinzo Abe menjelaskan bahwa Jepang akan menjadi negara yang pasifis yang proaktif, sehingga Jepang akan mudah dalam memilih berbagai opsi kebijakan utamanya terkait dengan kebijakan keamanan di Kawasan Asia Timur. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu sistem pengumpulan data yang berfokus pada informasi yang berasal dari buku, dokumen, jurnal, dan surat kabar baik cetak maupun elektronik (Faisol, 2015).

Hasil studi ini menunjukkan bahwa perubahan lingkungan keamanan Jepang pasca berakhirnya Perang Dingin telah membawa perubahan mendasar dan struktural dalam strategi dan doktrin pertahanan, sementara Jepang selama ini hanya mengandalkan kerja sama pertahanan AS. Ketidakstabilan keamanan yang ada di Kawasan Asia Timur memaksa Jepang untuk mengubah strategi dan prinsip dasar kebijakan pertahanannya. Sementara itu, seiring dengan semakin kompleksnya perubahan tatanan politik internasional, Jepang, salah satu sekutu terkuat Amerika Serikat di Asia Timur, harus mengubah perannya untuk beradaptasi dan berkontribusi terhadap tatanan politik internasional yang baru. Peran Jepang telah berubah, menjadi lebih aktif dalam mendorong perdamaian dan stabilitas regional dan global. (Faisol, 2015).

Persamaan penelitian ini yaitu fokus terhadap peran Jepang dalam politik di Kawasan Asia Timur, serta terciptanya transformasi kebijakan pertahanan Jepang dalam perannya di Kawasan Asia Timur. Tetapi, dalam penelitian ini perlu adanya

penelitian kembali dari perubahan kebijakan pertahanan Jepang. Maka dari itu perbedaan penelitian ini dengan mengubah jangka waktu, serta perubahan kebijakan pertahanan Jepang yang terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2022, dan pengaruh kebijakan tersebut dalam menjaga kestabilan di kawasan yang lebih terperinci yaitu Kawasan Laut Cina Timur.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian ketujuh yang diteliti oleh Destrina Christianty dkk. penelitian ini berjudul yaitu “*GEOPOLITIK CINA DAN JEPANG DI ASIA TIMUR: SENKETA KEPULAUAN DIAOYU/SENKAKU*” penelitian ini di terbitkan dalam *Journal Of Asia-Pasific Studies*. Fokus dari penelitian ini merupakan sebuah penyelidikan dalam perselisihan yang dilakukan Jepang dan Tiongkok terkait kepulauan Senkaku atau kepulauan Diaoyu dengan menggunakan pendekatan interaksi geografis atau geopolitik. Konflik tersebut dipicu oleh kepemilikan cadangan sumber daya alam minyak dan gas di kepulauan. Untuk pertama kali bahwa kepemilikan kepulauan tersebut dimiliki oleh pemerintah Jepang. Lalu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: *Bagaimana Geopolitik Antara Tiongkok Dan Jepang Dalam Sengketa Kepulauan Diaoyu/Senkaku?*. Destrina berupaya untuk mengetahui letak sebuah geografis beberapa pulau tersebut serta sejarah kepemilikan beberapa pulau tersebut. Metode penelitian yang digunakan Destrina yaitu menggunakan metode deskriptif analitis serta pendekatan kualitatif, metode ini digunakan untuk memahami sebuah fenomena yang ada kaitannya dengan pengalaman yang diteliti (Christianty et al., 2019).

Dengan fokus terhadap geopolitik maka untuk menjawab rumusan masalah, peneliti memberikan penjelasan bahwa berbicara tentang geopolitik ini berhubungan dengan interaksi antara negara serta aturan dalam pengaturan geografis tertentu. Ini terkandung di dalam buku *From the Cold War to the 21st Century*. Geografi merupakan sebuah faktor hal yang paling mendasar dalam politik internasional karena, geografi merupakan sebuah unsur paling utama. Cina mengklaim kepulauan tersebut dari aspek Sejarah, yaitu sejak digunakannya jalur navigasi oleh kekaisaran Qing. Kemudian, Jepang meyakini bahwa kepemilikan pulau-pulau tersebut berdasarkan dari *terra nullius* atau tanah yang tak bertuan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan Jepang dan Amerika Serikat setelah perang dunia II (Christianty et al., 2019).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Jepang telah mengelola Kepulauan Senkaku, atau Kepulauan Diaoyu, sejak tahun 1894. Dari tahun 1952 hingga 1972, Amerika Serikat mengatur seluruh Kepulauan Senkaku, atau Kepulauan Diaoyu. Akhirnya, setelah tahun 1972, meskipun ada tentangan dari Tiongkok, Amerika Serikat mengembalikan pulau-pulau tersebut ke Jepang melalui Perjanjian Pengembalian Okinawa. Peneliti menjelaskan bahwa yang terbaik bagi kedua negara adalah bernegosiasi satu sama lain dan mencari kompromi, solusi terhadap konflik tersebut. Jika solusi tidak dapat ditemukan, Tiongkok dan Jepang perlu mendatangkan pihak ketiga dari Kawasan Asia Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut (Christianty et al., 2019).

Persamaan penelitian ini terdapat sebuah penelitian yang mengharuskan Jepang mengubah kebijakan pertahanannya. Perubahan kebijakan pertahanan ini

bertujuan dalam mengcounter yang dilakukan Cina di Laut Cina Timur atau kepulauan Senkaku. Perlu adanya sebuah penelitian lanjutan yang melihat bagaimana kestabilan Kawasan Laut Cina Timur. Maka dari itu yang menjadikan perbedaan dari penelitian dengan peneliti, yaitu adanya sebuah penelitian lanjutan serta peran kebijakan pertahanan Jepang dalam menjaga kestabilan di Kawasan Laut Cina Timur atau kepulauan Senkaku.

Penelitian terdahulu kedelapan dengan judul “*PENGARUH PENINGKATAN KEKUATAN MILITER TIONGKOK TERHADAP KEAMANAN STABILITAS REGIONAL ASIA TIMUR*”. jurnal ini di publikasi sebagai jurnal *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, yang ditulis oleh Laode Muhammad Fathun. Fokus tulisan ini bagaimana Cina selalu meningkatkan pengeluaran dan ancaman terhadap regionalisme Asia Timur. Serta bagaimana peningkatan kekuatan militer Cina mempengaruhi terhadap sebuah kestabilan Kawasan Asia Timur. Metode yang digunakan peneliti yaitu penelitian deskripsi, yaitu seorang peneliti harus mengetahui dan menemukan dua poin utama yaitu, unit analisis tingkat fenomena yang hendak dijelaskan, dan unit eksplanasi yakni berkaitan dengan penentuan variabel independen dan perilaku yang hendak diamati. Serta penelitian ini menggunakan Teknik analisis kualitatif dengan Teknik data menggunakan kajian literatur atau data sekunder.

Peneliti berusaha melihat dari transformasi ekonomi Cina yang begitu pesat yang dapat mempengaruhi politik di negara Cina, serta Cina merupakan negara ekonomi terkuat didunia pada saat ini. Namun, dalam penilaian penelitian melihat bahwa Cina telah mengalami sebuah penurunan ekonomi. Tetapi, meskipun terjadi

sebuah penurunan ekonomi, tidak menghalangi usaha Cina dalam melakukan sebuah pengeluaran dari belanja militer. Modernisasi peralatan militer merupakan sebagai salah satu cara Cina dalam menjadikan negaranya sebagai negara yang kuat dalam bidang militer. Terlihat yang dilakukan Cina dengan menunjukkan konsistensinya dalam meningkatkan kapasitas militer sebagai strateginya (Fathun, 2016).

Peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan dari peningkatan yang dilakukan militer cina baik dalam segi alutsista, belanja militer, dan personal merupakan pengaruh dari *security dilemma* keamanan masa lalu. Ini dibuktikan dengan negara yang berkonflik dengan Cina baik dalam perang maupun perang kontemporer juga melakukan yang sama. Meskipun transformasi ekonomi dinilai sedang turun, tidak menghentikan Cina dalam memodernisasi angkatan militernya. Bukan hanya itu dalam mempertegas Cina di dalam politik internasional yang anarkis, Cina senantiasa untuk melakukan sebuah jalinan aliansi dengan Rusia dengan tujuan untuk menyeimbangkan poros barat yang digaungi oleh hegemoni Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dalam hal ini, peran peningkatan kekuatan militer Cina dalam kestabilan Kawasan di Asia Timur, bahwa kondisi Regional Asia Timur masih tergolong dalam wilayah yang tidak stabil di akibatkan oleh negara-negara kawasan masih saling berkonflik walaupun tidak sampai pada tingkatan perang (Fathun, 2016).

Persamaan penelitian ini menekankan peran sebuah aktor negara dalam melakukan peningkatan kekuatan militer terhadap kestabilan Kawasan Asia Timur, serta persamaan melihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau

aktor. Meskipun penelitian ini menggunakan aktor negara Cina sebagai aktor utama, yang akan sulit untuk melihat pengaruh peningkatan kekuatan Cina dalam kestabilan Kawasan Asia Timur. Akhirnya yang kemudian menjadikan perbedaan dengan peneliti yaitu, dengan mengubah suatu aktor yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kestabilan di Kawasan Asia Timur atau bahkan Kawasan Laut Cina Timur yaitu Jepang. Hal ini dibuktikan dengan Jepang mengeluarkan dokumen strategi (NSS) dalam menunjang kestabilan di Kawasan Asia Timur atau bahkan di Kawasan Laut Cina Timur. serta perlu adanya sebuah penelitian lanjutan terhadap masalah ini.

Penelitian terdahulu kesembilan yang berjudul “*Japan Shifting Military Priorities: Counterbalancing Cina’s Rise*”, penelitian ini dipublikasi sebagai *journal Asian Security*. Penelitian ini ditulis oleh *Bjørn Elias Mikalsen Grønning*. Penelitian ini berfokus pada Analisa fase terbaru yang dilakukan pemerintah Jepang tentang kebijakan keamanan Jepang dengan fokus pada pergeseran prioritas dari *Japan self-defense force* (JSDF) dengan aliansi Jepang yaitu Amerika Serikat. Perubahan prioritas tersebut dilihat dari perspektif *realisme*, peneliti berpendapat perubahan prioritas ini merupakan sebuah respons yang dilakukan Jepang untuk penyeimbangan tradisional terhadap kebangkitan Cina. Penelitian ini menggunakan teori *balance of threat* yang berpandangan bahwa perilaku penyeimbang ini dijelaskan pada dua faktor utama, yaitu persepsi Jepang tentang perilaku agresif Cina di ranah maritim, serta kekhawatiran yang berkaitan dengan perubahan distribusi kemampuan yang menguntungkan Cina.

Perubahan prioritas dimulai pada tahun 2010, di mana adanya perubahan *National Defense Program Guidelines* (NDPG) atau panduan program pertahanan yang diubah setiap sepuluh tahun sekali. Letak perubahan dilihat dari doktrin konsep *Basic Defense Force* (BDF) menjadi *Dynamic Defense Force* (DDF). Perubahan ini bertujuan sebagai bentuk respon akan ekspansi oportunistis Cina di Laut Cina Selatan yang di dalam (NDPG) menyebutkan yaitu sengketa zona abu-abu atau *grey zone dispute*. Konsep (DDF) bertujuan untuk menggeser bobot militer Jepang ke wilayah konflik. Secara khusus, (NDPG) mencatat, (JSDF) akan meningkatkan postur pertahanannya dengan menempatkan prioritas pada penguatan fungsi-fungsi seperti *intelligence, surveillance, and reconnaissance* (ISR), *patrol maritim*, pertahanan udara, respons terhadap serangan rudal balistik, transportasi, dan komunikasi komando, termasuk di wilayah barat daya (Grønning, 2014).

Penelitian ini sangat merinci dalam membahas persenjataan, berbagai cabang ikut dibahas yaitu dengan penekanan terhadap pembaruan atau pergantian persenjataan dengan lebih canggih. Penelitian ini menilai bahwa Cina terus meningkatkan kekuatannya, maka demikian mengharuskan Jepang untuk menyeimbangkan kekuatan Cina dengan sama meningkatkan kekuatannya. Bukan hanya itu, bentuk penyeimbangan Jepang dengan berupaya perkuatan aliansi dengan negara-negara yang bekerja sama dengan mereka, terutama Amerika Serikat. Kedua negara setuju dalam menghadapi Cina dengan mengarahkan Cina untuk bertindak lebih bijak dan tidak meningkatkan ketegangan regional agar terjadi sebuah kestabilan di kawasan. Teori *balance of threat* dinilai dapat

menjelaskan Tindakan Jepang dalam upaya penyeimbangan kekuatannya dengan Cina, terutama Tindakan Cina yang terlihat sebagai proyeksi kekuatan dan ambisinya. Ini di buktikan dengan sering datangnya kapal Angkatan laut mendekati perbatasan Jepang dan sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu, ini membuktikan bahwa Cina tidak segan dalam mengancam Jepang bahkan dengan dukungan Amerika Serikat sekalipun (Grønning, 2014).

Persamaan penelitian ini dilihat dari persamaan dalam membahas bagaimana Jepang dalam menyeimbangkan kekuatannya terhadap Cina. Walaupun, kepemilikan senjata Jepang dianggap sudah tertinggal zaman, tetapi Jepang berusaha untuk meningkatkan kekuatannya dalam menciptakan sebuah kestabilan di Kawasan Asia Timur. tetapi perlu adanya sebuah penelitian lanjutan yang melihat usaha Jepang dalam penyeimbangan kekuatan bukan hanya dengan beraliansi tetapi menciptakan sebuah kebijakan baru. Hal ini menjadikan sebuah pembeda antara penelitian Bjorn dengan peneliti yang dilihat bukan hanya dari segi aliansi tetapi juga dari segi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang.

Penelitian terdahulu kesepuluh yang ditulis oleh *Christopher W. Hughes*, dengan judul “*Japan ‘Resentful Realism’ and Balancing Cina’s Rise*”, penelitian ini dipublikasi sebagai *The Chinese Journal of International Politics*. Penelitian yang di terbitkan pada tahun 2016, Christopher adalah seorang profesor dengan fokusnya pada politik internasional serta pembelajaran mengenai Jepang di University of Warwick. Fokus dari penelitian ini bagaimana Jepang merubah cara dalam menghadapi Cina dengan mempertimbangkan opsi militer. Hal ini dibuktikan dengan Jepang yang secara aktif membangun kekuatan militernya,

memperkuat relasi dengan Amerika Serikat dan memberikan tekanan pada Cina melalui jalur diplomasi.

Bersumber dari *Neo-realist* Penelitian ini menyatakan bahwa, Jepang telah gagal dalam merespons naiknya kekuatan militer Cina, ini disebabkan karena Jepang tidak berusaha untuk membangun kekuatannya untuk menyeimbangkan kekuatan militer Cina. Ada beberapa argumen yang menjadikan Jepang telah gagal dalam pandangan *Neo-realist*, tingkat domestik Jepang lebih menekankan jalur damai, atau bahkan mengandalkan kepercayaannya bahwa aliansi kekuatan dengan Amerika akan sangat berpengaruh. Argumen tersebut dilihat dari tindakan Jepang dengan membangun militernya berdasarkan konsep *defensive realism* di mana fokus dari konsep ini lebih mengedepankan aliansi dengan Amerika Serikat sebagai negara *superpower* global (Hughes, 2016a).

Christopher menyebutkan bahwa, setidaknya Jepang telah berusaha untuk terjadinya perubahan dimulai dengan melihat perkembangan militer Cina. Hal ini ditunjukkan dengan upadaya pemerintah Jepang dalam mengubah atau mengamendemenkan undang-undang, yang secara tidak langsung mengubah sistem kemiliteran Jepang Kembali seperti semula atau remiliterisasi. ini memungkinkan (JSDF) diberikan beberapa wewenang oleh pemerintah Jepang dalam merubah doktrin tempur, serta mengembangkan persenjataan, kemampuan dalam operasi yang dilakukan diluar Jepang tanpa harus terlibat dengan misi tertentu. Christopher menulis jurnal ini untuk melihat Tindakan yang dilakukan oleh Jepang apakah mulai memasuki pendekatan “keras” yaitu dengan mempertimbangkan militer, atau

menggunakan pendekatan “lembut” yaitu dengan menggunakan diplomasi (Hughes, 2016a).

Alasan mengapa respons Jepang dinilai kurang dikarenakan, Jepang tidak mempertimbangkan perkembangan Cina sedemikian pesat terutama dalam bidang militer. Anggapan Jepang pada perang dingin, Cina bukanlah ancaman yang berat bagi Jepang. Jepang menganggap Uni Sovietlah yang menjadi ancaman berat bagi Jepang, karena mempunyai uni Soviet dalam menggunakan senjata nuklir. Ini alasan Jepang dengan negara-negara di Asia Timur dikagetkan dengan perkembangan Cina yang cepat terjadi.

Kesimpulan yang ditulis Christopher yaitu Jepang telah mengambil Tindakan dalam upaya untuk memulai penyeimbangan kekuatannya kembali setelah melihat kapabilitas Cina. Kepercayaan bahwa *offense-defense balance* antara Cina dan Jepang sudah tidak lagi bertumpu pada Jepang yang lebih unggul, terutama dengan modernisasi yang dilakukan Cina pada militer, serta Amerika Serikat yang sudah tidak menjadi terlalu aktif dalam aktivitasnya sebagai polisi dunia. Penyeimbangan yang dilakukan oleh Jepang yaitu dengan menggunakan dua cara, melalui jalur lembut dengan menggunakan pendekatan diplomasi bersama negara lain di Asia Timur yang sama terancam dengan Cina. Cara kedua dengan menggunakan pendekatan keras yaitu meningkatkan kapabilitas dan memperbaharui *Japan self-defense force* JSDF dalam menghadapi berbagai ancaman isu keamanan (Hughes, 2016a).

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama berfokus terhadap usaha Jepang dalam menyeimbangkan kekuatannya dengan Cina. Usaha Jepang dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan halus dan kasar, dan memungkinkan Jepang untuk meningkatkan kebijakan pertahanannya untuk Upaya penyeimbangan. Perlu adanya sebuah penelitian lanjutan dengan melihat kebijakan baru Jepang dalam menyeimbangkan kekuatannya dengan Cina. Maka dari itu, ini merupakan sebuah pembaruan bagi peneliti dalam meneliti kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang guna menjaga kestabilan Kawasan Laut Cina Timur.

Berdasarkan dari artikel yang peneliti ulas dengan penyeimbangan yang dilakukan Jepang, terhadap agresifnya Cina dalam meningkatkan kekuatannya dengan memperbaharui dari sebuah dokumen strategi (NSS) pada tahun 2022. Pemaparan hasil dari semua artikel menjelaskan bahwa jarang sekali dari semua artikel tersebut membahas bagaimana peran penting dari dokumen strategi (NSS) ini terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Dokumen strategi ini sangat penting guna untuk guideline Jepang dalam mengeluarkan kebijakannya, terutama kebijakan pertahanan. Di samping itu, bahwa usaha yang Jepang lakukan hanya menimbulkan kegagalan, ini dibuktikan dari pandangan *neo-realis* mengenai kegagalan yang dilakukan Jepang yang tidak mempertimbangkan perkembangan Cina yang begitu pesat terutama dalam bidang militer. Menjadikan Jepang tidak mempertimbangkan perkembangan Cina pada saat itu, diakibatkan ada sebuah negara yang harus lebih di pertimbangkan seperti Uni Soviet.

Dari kesepuluh artikel ini menjelaskan bahwa, usaha yang dilakukan Jepang hanya menggunakan satu strategi yaitu melakukan aliansi atau meningkatkan

kapabilitas JSDF. Jika hanya melihat satu strategi yang dilakukan Jepang kemungkinan Jepang untuk gagal akan tinggi. Tetapi peneliti melihat pada periode usaha Jepang bukan hanya menggunakan satu strategi saja dalam menyeimbangkan kekuatan Cina. Peneliti melihat usaha yang dilakukan Jepang dalam penyeimbangan kekuatannya dengan memperbaharui dokumen strategi (NSS) pada tahun 2022 lalu, Jepang mengeluarkan kebijakan peningkatan anggaran militer terbesarnya setelah perang dunia dua. Bukan hanya itu usaha Jepang dalam penyeimbangan kekuatan dengan Cina adalah dengan mengubah doktrin terhadap (JSDF), sehingga (JSDF) memiliki kapabilitas terhadap tugasnya dalam menjaga kedaulatan negaranya dan kestabilan Kawasan di Laut Cina Timur. Dan Jepang menggunakan sebuah konsep dari *collective defense* sebagai Upaya pencegahan Jepang.

Maka dari itu, peneliti akan berfokus usaha yang dilakukan Jepang dalam menjaga kedaulatan dan kestabilan Kawasan Laut Cina Timur, yaitu dengan menggunakan penerapan dokumen strategi (NSS), yang berfokus dalam melakukan sebuah aliansi atau *collective defense* dengan negara yang sepemikiran dengan Jepang, peningkatan anggaran militer Jepang terbaru, serta penguatan kapabilitas kekuatan (JSDF). Sehingga usaha dalam menyeimbangkan kekuatan peningkatan militer Cina dapat terpenuhi.

Tabel 2. 1 tabel tinjauan pustaka

No.	Judul, penulis dan penerbit	Teori, dan rumusan masalah	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1	<p>Fadhil Alghifari, dan Raja Nathania Olga Letticia</p> <p>Analisis Teori <i>Offense-Defense</i> Pada Reformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Dalam Dinamika Keamanan Di Asia Timur,</p> <p>Global: Jurnal Politik Internasional</p>	<p>Teori <i>offense-defense</i></p> <p>Bagaimana peran Jepang dalam menjaga keseimbangannya di Kawasan Asia Timur?</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama melihat alasan Jepang mereformasi kebijakan pertahanan</p>	<p>Pembeda dengan penelitian ini adalah penulis berusaha ingin melihat pengaruh dari reformasi kebijakan Jepang terhadap kestabilan di wilayah Asia Timur.</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Jepang telah memainkan perannya sebagai defender, serta Jepang berkontribusi atas keseimbangan <i>offense-defense</i> dan dinamika keamanan di Asia Timur .</p>
2	<p>Angga Nurdin Rachmat</p> <p><i>Security Dilemma</i> Dalam Dinamika Hubungan Bilateral Cina dan Jepang,</p> <p>interdependence jurnal hubungan internasional</p>	<p><i>Security Dilemma</i></p> <p>Bagaimana pola hubungan dari negara Jepang dan Cina dari sudut pandang <i>security dilemma</i>?</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini yaitu peneliti berusaha melihat hubungan yang terjadi antara Cina dan Jepang, bahkan penulis melihat awal mula masalah tersebut dari terciptanya sebuah <i>security dilemma</i> antara Jepang dan Cina</p>	<p>Perbedaan peneliti dengan penelitian ini yaitu peneliti ingin memberikan gambaran dari pengaruhnya terhadap kestabilan wilayah Asia Timur</p>	<p>Dinamika yang terjadi antara kedua negara masih mengarah kepada pola <i>enmity</i>, yaitu hubungan yang terjalin atas dasar kecurigaan (<i>suspicion</i>) dan rasa takut (<i>fear</i>). Bahkan dinamika hubungan tersebut diperburuk dengan sengketa kepulauan Senkaku dan Diaoyu.</p>

No.	Judul, penulis dan penerbit	Teori, dan rumusan masalah	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
3	<p>Ananda F Ayu</p> <p>Upaya Jepang Di bawah Pemerintahan Shinzo Abe Dalam Meningkatkan Pertahanan Militer,</p> <p><i>journal Transformasi</i></p>	<p><i>Security</i></p> <p>Bagaimana Upaya Jepang di bawah pemerintahan Shinzo Abe dalam meningkatkan pertahanan militernya?</p>	<p>Meneliti kebijakan keamanan militer Jepang atas dasar meningkatkan pertahanan Jepang terhadap kekuatan militer yang dimiliki Cina, dengan itu peneliti melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Shinzo Abe dilatar belakangi kondisi regional di Asia Timur yang semakin tidak aman</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini yaitu perlu adanya sebuah penelitian lanjutan dalam melihat strategi Jepang di Tengah meningkatnya kekuatan Cina di Asia Timur, dengan begitu hal ini menjadikan sebuah perbedaan dari penelitian ini, yang mana pada saat ini telah berubahnya kepemimpinan di Jepang.</p>	<p>konsep <i>Dynamic Defense Force</i> merupakan konsep yang digunakan oleh pemerintah Shinzo abe dalam mengeluarkan sebuah kebijakan peningkatan pertahanannya yang Dimana Jepang mengubah doktrin pertahanannya yang lama dan mengganti yang baru. Perubahan yang terjadi adalah dengan digantikannya "<i>Basic Defense Force Concept</i>" menjadi "<i>Dynamic Defense Force</i>"</p>

No.	Judul, penulis dan penerbit	Teori, dan rumusan masalah	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
4	<p>Tjhang Zahra Anisa Pramaiseilla</p> <p>Dampak Sengketa Kepulauan Senkaku Antara Jepang Cina Terhadap Stabilitas Keamanan Jepang,</p> <p><i>Journal of International Relations</i></p>	<p>Keamanan Nasional</p> <p>Bagaimana dampak Konflik Kepulauan Senkaku terhadap stabilitas keamanan Jepang?</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu adanya sebuah penelitian yang meneliti sengketa kepulauan, dalam hal ini sengketa kepulauan Senkaku merupakan awal dari sebuah konflik yang peneliti lihat, serta awal mula pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan (NSS) tersebut</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yaitu perlu adanya penelitian lanjutan terhadap pengaruhnya pada kestabilan Kawasan Asia Timur atau Kawasan Laut Cina Timur. yang kita tahu bahwa dengan kepemilikan kekuatan militer dan ekonomi terbesar diantara negara tetangga lain di Asia Timur, menjadikan hubungan kedua negara ini perlu adanya perhatian yang lebih</p>	<p>Dengan adanya persengketaan kepulauan Senkaku menjadikan kestabilan Kawasan Laut Cina Timur menjadi memburuk bahkan akan berdampak terhadap kestabilan Jepang.</p>

No.	Judul, penulis dan penerbit	Teori, dan rumusan masalah	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
5	<p>Pradono Budi Saputro</p> <p>Strategi <i>Counterbalance</i> Jepang di Tengah Persaingan Kepemimpinan dengan Cina dalam Konteks Wacana Regionalisme Asia Timur,</p> <p><i>Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional</i></p>	<p><i>Counterbalance</i></p> <p>Bagaimana strategi Jepang dalam meng-counterbalance terhadap persaingan kepemimpinan di Asia Timur?</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdapat sebuah persaingan antara Jepang dan Cina, yang mengharuskan Jepang untuk menciptakan sebuah strategi baru dalam menyeimbangkan kekuatan Cina</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti mencoba menggunakan sebuah strategi baru yang dikeluarkan Jepang. Strategi baru itu yang akan peneliti lihat bukan hanya melihat dari sengketa yang terjadi Cina dengan Jepang di Laut Cina Timur. Tetapi melihat dari sengketa yang terjadi mengharuskan Jepang untuk mengeluarkan sebuah kebijakan baru</p>	<p>Usaha Jepang dalam memainkan peran ganda dalam percaturan dunia yaitu mengejar peran sebagai kekuatan utama di Kawasan dan menjaga kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur</p>

No.	Judul, penulis dan penerbit	Teori, dan rumusan masalah	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
6	<p>Wildan Faisol</p> <p>Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014,</p> <p><i>journal universitas jember</i></p>	<p>konsep proaktif pacifism</p> <p>bagaimana alasan Jepang untuk men-transformasi kebijakan pertahanannya pada tahun 2014?</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu fokus terhadap peran Jepang dalam politik di Kawasan Asia Timur, serta terciptanya transformasi kebijakan pertahanan Jepang dalam perannya di Kawasan Asia Timur atau Kawasan Laut Cina Timur</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yaitu jangka waktu, serta perubahan kebijakan pertahanan Jepang yang terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2022, dan pengaruh kebijakan tersebut dalam menjaga kestabilan di Kawasan Asia Timur atau Kawasan Laut Cina Timur.</p>	<p>Perubahan lingkungan yang menjadikan Jepang untuk mengubah secara fundamental dan struktur dalam strategi dan doktrin pertahanannya.</p>

No.	Judul, penulis dan penerbit	Teori, dan rumusan masalah	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
7	<p>Destrina Christianty, Geriel Jonathan, Lamtiur Simamora, Ribka Helena, Ruth Diana Rebecca, Sathya, dan Reysha Wacanno</p> <p>Geopolitik Cina Dan Jepang Di Asia Timur: Sengketa Kepulauan Diaoyu/ Senkaku,</p> <p><i>Jurnal Asia Pacific studies</i></p>	<p>Geopolitics</p> <p>Bagaimana geopolitik Cina dan Jepang dalam sengketa Kepulauan Diaoyu/ Senkaku?</p>	<p>Persamaan penelitian ini terdapat sebuah penelitian yang mengharuskan Jepang mengubah kebijakan pertahanannya, perubahan kebijakan pertahanan ini bertujuan dalam mengcounter yang dilakukan Cina di Laut Cina Timur atau kepulauan Senkaku</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yaitu perlu adanya sebuah penelitian lanjutan serta peran kebijakan pertahanan Jepang dalam menjaga kestabilan di Kawasan Laut Cina Timur atau kepulauan Senkaku</p>	<p>Dari kedua sisi memiliki alasan yang kuat dalam memperkuat klaim kepemilikan kepulauan Senkaku, tetapi sebaiknya kedua negara bernegosiasi dengan mencari jalan Tengah untuk menyelesaikan sengketa tersebut, apabila tidak mendapatkan solusi maka Cina dan Jepang dapat menghadirkan pihak ketiga dari negara tetangga.</p>

No.	Judul, penulis dan penerbit	Teori, dan rumusan masalah	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
8	<p>Laode Muhamad Fathun</p> <p>Pengaruh Peningkatan Kekuatan Militer Tiongkok Terhadap Keamanan Stabilitas Regional Asia Timur,</p> <p><i>The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin</i></p>	<p><i>Deterrence</i></p> <p>Bagaimana pengaruh peningkatan kekuatan militer Cina terhadap kestabilan Kawasan Asia Timur?</p>	<p>Persamaan penelitian ini menekankan peran sebuah aktor negara dalam melakukan peningkatan kekuatan militer terhadap kestabilan Kawasan Asia Timur atau Kawasan Laut Cina Timur, serta persamaan melihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau aktor</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini yaitu dengan berbedanya suatu aktor yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kestabilan di Kawasan Asia Timur atau Kawasan Laut Cina Timur yaitu Jepang. Hal ini dibuktikan dengan Jepang mengeluarkan dokumen strategi (NSS) dalam menunjang kestabilan di Kawasan Asia Timur. serta perlu adanya sebuah penelitian lanjutan terhadap masalah ini.</p>	<p>Bentuk konsistensi Cina dalam me modernisasikan Angkatan militernya, serta bentuk aliansi Cina dengan Korea Utara, Rusia, dan Iran menjadikan terbentuknya sebuah poros keseimbangan menuju pertempuran dwi polar.</p>
9	<p>Bjørn Elias Mikalsen Grønning</p> <p>Japan Shifting Military Priorities: Counter-balancing Cina's Rise,</p> <p><i>Asian Security</i></p>	<p><i>Balance of Threat</i></p> <p>Bagaimana prioritas Jepang dalam peningkatan senjata dan regulasi pasukan pertahanan?</p>	<p>Persamaan penelitian ini dilihat dari persamaan dalam membahas bagaimana Jepang dalam menyeimbangkan kekuatannya terhadap Cina</p>	<p>pembeda antara penelitian dengan peneliti, peneliti berusaha melihat bukan hanya dari segi aliansi tetapi juga dari segi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang.</p>	<p>Perubahan sistem keamanan di Asia Timur yang menjadikan Jepang untuk mengubah prinsip keamanannya</p>

No.	Judul, penulis dan penerbit	Teori, dan rumusan masalah	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
10	<p>Christopher W. Hughes</p> <p>Japan 'Resentful Realism' and Balancing Cina's Rise,</p> <p><i>The Chinese Journal of International Politics</i></p>	<p><i>Neo-realist</i></p> <p>Bagaimana cara Jepang merespons Cina dengan opsi militer?</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini yaitu sama berfokus terhadap usaha Jepang dalam menyeimbangkan kekuatannya dengan Cina.</p> <p>Usaha Jepang dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan halus dan kasar, dan memungkinkan Jepang untuk meningkatkan kebijakan pertahanannya untuk Upaya penyeimbangan</p>	<p>Perbedaan dari sebuah kebijakan baru Jepang yang peneliti lihat dalam menyeimbangkan kekuatannya dengan Cina</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam pandangan neorealis Jepang telah gagal terhadap Cina dalam merespons ketidaksesuaian skala ancaman Jepang.</p>

2.2. Kerangka Teoritis

Peneliti akan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz yaitu teori *balance of power*, serta menggunakan konsep kebijakan pertahanan dan konsep aliansi. Dalam membantu penelitian, peneliti menilai bahwa teori dan konsep ini akan cocok dengan pembahasan yang peneliti coba teliti yaitu kebijakan yang terdapat di dalam dokumen strategi (NSS) Jepang dalam menjaga stabilitas di Laut Cina Timur.

2.2.1. Teori *Balance Of Power*

Teori ini merupakan sebuah teori turunan yang dikeluarkan dari teori Neo-realisme. Neo-realisme berpandangan bahwa suatu negara akan mempertahankan survivalitas negaranya akibat dengan situasi struktur yang sangat anarkis, maka dari itu perlu adanya dua aktor *Super Power* dalam politik internasional ini. Tujuan dari adanya dua aktor *SuperPower* dalam politik internasional adalah untuk menciptakan sebuah keseimbangan kekuatan/*balance of power*, neo-realis menyatakan bahwa kondisi keseimbangan kekuatan/*balance of power* terjadi akibat adanya dua aktor *Super Power* yang menjadi penentu dinamika sistem internasional (Dugis, 2016). mengutip dari Kenneth Waltz keseimbangan kekuatan dapat terjadi Ketika dua aspek terpenuhi, yaitu kondisi tatanan sedang anarkis, serta adanya unit/aktor yang menginginkan selamat dari ancaman (Waltz, 1979).

Pada dasarnya keseimbangan kekuatan merupakan sebuah *meeting force with force*, artinya keadaan yang seimbang terjadi apabila terdapat dua poros utama kekuatan yang esensinya seimbang dan saling bertemu. Gambaran sederhananya

adalah apabila terjadi penyerangan antara kedua negara tersebut, maka kemungkinan dalam kemenangan maupun kekalahan apabila dihitung menjadi 50:50, atau artinya menang dan kalah akan sama imbangnya. Berangkat dari logika tersebut, maka kedua aktor pemilik kekuatan akan memilih untuk tidak saling serang. Apabila salah satu dari kedua aktor ingin menggunakan kekuatan yang dimilikinya, maka secara otomatis salah satu aktor yang lain akan menjadi sebuah batasan dengan wujud kekuatan sebagai sebuah tandingan dalam membatasi, mengoreksi dan mengontrol penggunaan kekuatan tersebut. Selanjutnya, dengan memiliki keinginan dalam memiliki sebuah *power* yang tinggi adalah keinginan universal, terjadi sebuah persaingan antarnegara, kelangkaan sumber daya, serta kurang wasit yang netral maka menyebabkan persaingan *power* itu terjadi. Dibarengi dengan sistem internasional yang anarkis maka dari itu perdamaian dan kestabilan internasional bisa dibangun apabila terjadi sebuah perimbangan kekuatan atau *balance of power* (Waltz, 1979).

Hal ini terlihat yang dilakukan oleh Jepang, yang mana usaha Jepang dalam menyeimbangkan kekuatannya dengan mengeluarkan sebuah dokumen strategi (NSS) pada tahun 2020. Serta usaha Jepang dalam mengeluarkan kebijakan pertahanannya yaitu dengan meningkatkan anggaran pertahanan Jepang terbesar setelah perang dunia 2. Maka Jepang berusaha untuk menciptakan perimbangan kekuatan atau *balance of power* dengan kekuatan Cina. Dibarengi dengan tatanan politik internasional Kawasan Laut Cina Timur yang anarkis, dibuktikan dengan adanya peluang konflik yang terjadi. Maka tujuan Jepang untuk menciptakan sebuah kestabilan Kawasan di Laut Cina Timur.

2.2.2. Konsep kebijakan pertahanan

Kebijakan pertahanan merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam upaya menjaga keutuhan kedaulatan negaranya, keutuhan suatu wilayahnya, serta terjauhnya ancaman dan gangguan baik itu dalam bidang militer maupun non militer demi menjaga keselamatan bangsa. Dalam bidang non-militer yaitu merupakan sebuah ancaman yang terdiri dari instrumen ideologi, psikologi, sosial budaya, informasi, teknologi, dan hukum dan HAM. Pembentukan kebijakan pertahanan dibentuk berdasarkan prinsip hak asasi manusia, demokrasi, kesejahteraan umum, ketentuan hukum nasional, kebiasaan internasional, hukum internasional, dan lingkungan hidup, serta sebuah prinsip dalam menjaga perdamaian dalam kehidupan, dan memperhatikan sebuah geografi (Wulandari, 2018).

Namun Hedley Bull memberikan pengertian dari konsep kebijakan pertahanan ini yaitu “sebuah Tindakan yang diambil oleh pemegang Keputusan dari suatu negara yang memiliki keinginan untuk melindungi negaranya dari ancaman musuh”. Namun dari konsep ini memiliki beberapa fokus salah satunya adalah fokus pada keamanan nasionalnya yaitu upaya melindungi keamanan nasionalnya. Yang kedua fokus tersebut bisa menuju pada penggunaan militer Dimana dari kebijakan pertahanan ini dapat melibatkan penggunaan kekuatan militer (Bull, 1977).

Dalam hal penelitian, konsep ini digunakan untuk melihat salah satu usaha Jepang dalam menjaga kestabilan Kawasan di laut Cina Timur, dengan mengeluarkan sebuah kebijakan pertahanan yaitu peningkatan anggaran

pertahanan. Kebijakan pertahanan Jepang yang dikeluarkan pemerintah Jepang, bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keselamatan bangsa keutuhan wilayah, dari ancaman dan gangguan militer. Kebijakan pertahanan Jepang akan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan jenis ancaman yang semakin meningkat. Jepang mengalami sebuah perubahan kebijakan pertahanan, yang awalnya memiliki sikap yang pasif menjadi aktif dalam politik internasional. Kebijakan pertahanan Jepang yang dikeluarkan mencakup ke dalam politik luar negeri, hubungan internasional, dan keamanan internasional(Wulandari, 2018).

2.2.3. *Collective Defense*

Dalam pengertiannya *collective defense* mengacu pada negara yang menginginkan sebuah Persekutuan dengan negara lain, yang mana negara lain yang memiliki sebuah pemikiran yang sama dalam satu Kawasan untuk melawan ancaman musuh bersama. Di dalam *collective defense* terdapat sebuah perjanjian formal sehingga setiap negara memiliki ikatan dan aturan yang berhak di tetapi oleh setiap negara anggota. Terakhir di dalam *collective defense* terdapat sebuah kombinasi kekuatan dari negara anggota, kombinasi ini bukan sebuah penggabungan ataupun sebuah peleburan. Setiap negara haruslah mengakui bahwa keamanan satu pihak adalah sebuah kewajiban keseluruhan dari setiap anggota negara (Tjarsono, 2013).

Ini sejalan dengan penelitian, dengan melihat usaha Jepang dalam menciptakan keseimbangan kekuatan dengan beraliansi dengan negara-negara sepemikiran. Argumen ini sejalan dengan isi dari dokumen strategi (NSS) 2022

yang dikeluarkan Jepang, yang berisi yaitu dalam menciptakan kestabilan di Kawasan dengan beraliansi dengan negara-negara sepemikiran Jepang.

2.3. Asumsi

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan dalam jawaban dengan berupa asumsi sebagai berikut:

“Dengan memperbaharui dokumen strategi (NSS) Jepang, peningkatan anggaran pertahanan Jepang yang terkandung dalam dokumen strategi (NSS), peningkatan kapabilitas pasukan pembela Jepang (JSDF), dan menciptakan sebuah jaringan collective defence. Usaha yang dilakukan Jepang ini merupakan sebuah bentuk perimbangan kekuatan Jepang dengan kekuatan Cina. Tujuan ini untuk menjaga kedaulatan Jepang dan menjaga kestabilan Kawasan di Laut Cina Timur.”

2.4. Kerangka Analisis

